



**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**Jakarta, 28 Juni 2016**

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

---

**Saudara Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,  
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas perkenan-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka melaksanakan proses pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pengajuan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 pada awal Juni 2016 selain sesuai dengan amanat perundangan, juga dimaksudkan untuk merespons perkembangan perekonomian dunia dan nasional, serta hasil pemantauan pelaksanaan APBN tahun 2016 dalam beberapa bulan berjalan.

Dalam situasi yang dinamis dan keadaan eksternal yang terus berkembang, kita harus dapat terus mengantisipasi dan memitigasinya agar tidak menimbulkan dampak negatif pada perekonomian nasional dan kita dapat terus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal itu, kami atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungannya dalam menyelesaikan pembahasan RUU APBN Perubahan tahun 2016. Kami menilai, banyak masukan yang konstruktif dari anggota Dewan Yang Terhormat dalam

menyempurnakan proposal RUU yang diajukan oleh Pemerintah, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang jauh lebih baik untuk kepentingan nasional.

**Para hadirin sekalian,**

Melalui hasil pembahasan di Komisi dan Badan Anggaran DPR RI, telah disepakati penyesuaian beberapa indikator ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan APBN Perubahan tahun 2016, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar **5,2 persen**;
2. Laju inflasi sebesar **4,0 persen**;
3. Nilai tukar rupiah rata-rata **Rp13.500/USD**;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan rata-rata **5,5 persen**;
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata **USD40/barel**;
6. *Lifting* minyak rata-rata **820** ribu barel/hari; dan
7. *Lifting* gas rata-rata **1.150** ribu barel setara minyak/hari.

Perkembangan indikator tersebut di atas akan terus kami pantau pencapaiannya sampai dengan akhir tahun 2016, termasuk melakukan langkah-langkah antisipasi bila diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional.

Kesepakatan lain antara Pemerintah dan DPR yang sangat signifikan dan strategis adalah menyesuaikan target defisit anggaran dalam APBNP tahun 2016 menjadi Rp296,7 triliun (atau 2,35 persen PDB), dari yang diusulkan dalam RAPBN Perubahan tahun 2016 sebesar Rp313,3 triliun (atau 2,48 persen dari PDB). Hal ini menjadikan APBN Perubahan tahun 2016 menjadi lebih *prudent* dan memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk merespon dinamika global dan domestik yang akan berkembang di tahun berjalan ini, termasuk dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan target defisit anggaran sebesar 2,35 persen dari PDB tersebut, maka Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBNP tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.786,2 triliun dan Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.082,9 triliun.

Target pendapatan negara dan hibah dalam APBNP tahun 2016 tersebut telah memperhitungkan perkembangan dan proyeksi perekonomian nasional terkini, upaya untuk menjaga iklim investasi kegiatan usaha, meningkatkan stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, serta memberikan stimulus pada perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan, Pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan berbagai langkah-langkah prioritas dalam pencapaian target perpajakan yang semakin meningkat ke depan, termasuk kebijakan *tax amnesty*, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Sejalan dengan itu, Pemerintah akan terus melakukan revisi regulasi perpajakan, pembenahan administrasi dan IT perpajakan, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tugas-tugas perpajakan ke depan.

Di sisi Belanja Negara, Pemerintah akan melanjutkan langkah penghematan anggaran belanja pemerintahan, terutama untuk kegiatan operasional dan yang kurang produktif, guna dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi setiap rupiah dana yang dikeluarkan. Diharapkan belanja pemerintah yang lebih produktif akan dapat terus mendukung akselerasi laju perekonomian nasional, pada saat perekonomian global yang masih mengalami perlambatan.

Dengan perkiraan harga minyak yang lebih tinggi dari yang diusulkan dalam RAPBN Perubahan tahun 2016 yaitu rata-rata USD35/barel, maka diharapkan dana bagi hasil daerah penghasil Migas dapat lebih tinggi dari perkiran awal,

serta menambah alokasi belanja yang lebih produktif di Kementerian/Lembaga serta Dana Alokasi Khusus.

Sejalan dengan penetapan Defisit APBN Perubahan tahun 2016 sebesar 2,35 persen PDB, Pemerintah akan memanfaatkan dana SAL dan SBN untuk membiayai perubahan target defisit tersebut. Namun demikian, di sisi pembiayaan juga akan dilakukan beberapa kebijakan yang penting, diantaranya melanjutkan investasi melalui BUMN, penyediaan dana untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur, serta mendukung sustainabilitas program BPJS Kesehatan.

**Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikian pokok-pokok besaran dan kebijakan perubahan dalam APBN tahun 2016 yang disepakati Pemerintah dan DPR untuk ditetapkan dalam UU APBN Perubahan tahun 2016.

Kami sebagai wakil Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Dewan, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Komisi, serta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, atas kerjasama dan dukungannya dalam membahas dan menetapkan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Semoga apa yang telah dihasilkan dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan Negara yang tercinta.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Juni 2016

A.n. Pemerintah

Menteri Keuangan RI,

Bambang P.S. Brodjonegoro